



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh

The Influence of Regional Local Revenue, General Allocation Funds and Capital Expenditures on Financial Independence of Districts/ Cities in Aceh Province

Putri Maharani^{1*}, Wahyuddin², Marzuki³, Jummaini⁴

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

Email : putri.210410211@mhs.unimal.ac.id¹, wahyuddin@unimal.ac.id², marzuki@unimal.ac.id³, jummaini@unimal.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 09-07-2025

Revised : 10-07-2025

Accepted: 12-07-2025

Published : 14-07-2025

Abstract

This research aims to examine the influence of local revenue, general allocation funds and capital expenditures on the financial independence of districts/cities Aceh Province. This research uses a combination of cross-section data with time series in 23 districts/cities Aceh Province during 2019-2023. The data analysis method used is panel data regression with the help of e-views 12. The results of this research prove that local revenue has a positive and significant effect on regional financial independence. General allocation funds have a negative and significant effect on regional financial independence. Capital expenditures have a positive and significant effect on regional financial independence. The magnitude of the influence of local revenue, general allocation funds and capital expenditures on the financial independence of district/cities in Aceh Province is 95.58% and means that the other 4.42% is influenced outside this variable. The importance of the results of this research is to enrich and test theories of public economics, regional financial management and taxation policies. The results of the research not only provide new insights into the situation of regional financial management in Indonesia, but can also be a basis for further refining and developing existing theories.

Keyword: *Regional financial independence, regional original income, general allocation fund*

Abstrak

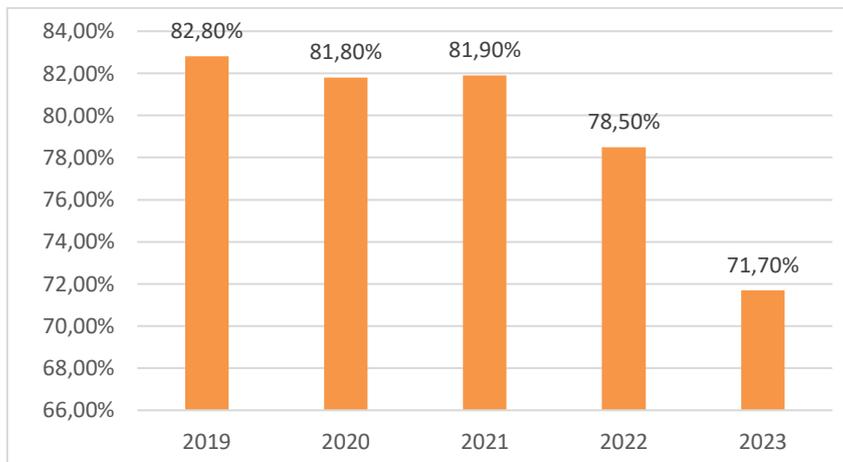
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota provinsi aceh. Penelitian ini menggunakan gabungan data *cross section* dengan *time series* pada 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh selama tahun 2019-2023. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan *eviews 12*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Besarnya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh adalah sebesar 95,58 % dan berarti 4,42% lainnya dipengaruhi diluar variabel ini. Pentingnya hasil penelitian ini untuk memperkaya dan menguji teori-teori ekonomi publik, pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan perpajakan. Hasil penelitian tidak hanya memberikan wawasan baru mengenai situasi pengelolaan keuangan daerah di indonesia, namun juga dapat menjadi landasan untuk lebih menyempurnakan dan mengembangkan teori-teori yang sudah ada.

Kata Kunci : *Kemandirian keuangan daerah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum*



PENDAHULUAN

Kemandirian finansial daerah adalah cerminan seberapa jauh pemerintah daerah bergantung pada dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Semakin besar tingkat kemandirian finansialnya, semakin sedikit pula daerah tersebut membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Kemandirian finansial daerah merupakan salah satu sasaran utama dalam otonomi daerah (Mahardika & Fauzan, 2022). Pelaksanaan otonomi daerah masih memicu sejumlah persoalan. Salah satunya, masih besarnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan finansial. Persoalan itu disampaikan oleh Tito Karnavian (Mendagri) menyebutkan “proporsi anggaran kabupaten/kota di Aceh lebih besar dari pusat karna pendapatan asli daerahnya kecil (*Pemerintah Aceh Masih Bergantung Dengan Transfer Pusat*, 2022).



Berdasarkan grafik ketergantungan keuangan daerah, rata-rata rasio ketergantungan daerah provinsi aceh dari tahun 2019-2023 sebesar 79,32% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pada tahun 2023 rasio ketergantungan keuangan daerah Provinsi Aceh adalah 71,70% yang berarti tingkat ketergantungan pemerintah aceh terhadap pusat masih sangat tinggi. Berdasarkan penjelasan diatas, ketergantungan keuangan daerah Provinsi Aceh masih menerima banyak dukungan dari pemerintah pusat, seperti dana alokasi umum, yang menyebabkan terjadinya ketidakefisienan dalam pengeluaran daerah, termasuk pengeluaran untuk investasi. Sehingga mengindikasikan daerah tersebut tidak mandiri dalam mengelola keuangannya (Machfud et al., 2021)

Kondisi ini dapat menyebabkan munculnya stigma buruk tentang ketidakmampuan daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari PAD. Ini sangat memprihatinkan, terutama ketika Aceh memiliki anggaran melimpah dari pemerintah pusat, tetapi tetap belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, yang menunjukkan bahwa Aceh belum memiliki kemandirian finansial (Machfud et al., 2021)

Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat kemandirian yang masih rendah. Sebagai salah satu provinsi dengan PAD tertinggi urutan ke 5 di Sumatera. Kemandirian keuangan daerah Aceh memiliki tren yang meningkat (BPK RI, 2019). Berdasarkan grafik, terlihat bahwa kemandirian perkabupaten/kota Provinsi Aceh berbeda-beda dan berfluktuasi setiap tahunnya serta masih jauh dari kata mandiri. Diantara 23 kabupaten/kota hanya Banda Aceh yang tingkat kemandiriannya tinggi yaitu 30%. Rendahnya tingkat kemandirian keuangan kabupaten/kota Provinsi Aceh disebabkan PAD yang digunakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Aceh masih rendah.



Hasil perhitungan tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh rata-rata kemandirian daerah pada 5 tahun terakhir memiliki pola hubungan instruktif karna berada dibawah 25% yaitu 12%. Pola instuktif adalah peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah (Setiawan et al., 2021). Hal ini menunjukkan pemerintah Aceh belum maksimal dalam menjalankan perannya untuk mencapai tujuan pemerintah dalam meningkatkan kemandirian keuangan di Aceh.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh periode 2019/2023. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi, referensi dan pengukuran bagi semua pihak yang ingin mengembangkan dan menambah pengetahuannya mengenai pendapatan asli daaerah, dana alokasi umum, belanja modal dan kemandirian keuangan daerah.

Tinjauan Pustaka

1. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan serta menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan sumber daya keuangan yang dimiliki secara mandiri, tanpa bergantung secara signifikan pada dana dari pemerintah pusat. Ketika suatu daerah mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi keuangannya sendiri, maka fleksibilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan daerah akan semakin besar, sehingga arah pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal (Samudra & Handayani, 2020).

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah mengacu pada penerimaan yang diperoleh daerah dari potensi ekonomi yang berada dalam wilayah kewenangannya. Ketika jumlah PAD melampaui dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat, daerah tersebut dapat dikategorikan sebagai daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi. Dengan meningkatnya PAD, diharapkan daerah mampu membiayai kebutuhan internalnya secara mandiri, sehingga ketergantungan terhadap dana pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dapat ditekan seminimal mungkin (Machfud et al., 2021).

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi umum adalah dana yang ditransfer untuk menciptakan keseimbangan kemampuan finansial antara wilayah. DAU diinginkan dapat berdampak positif terhadap peningkatan kemandirian finansial dari daerah. Namun, jika suatu wilayah mendapatkan DAU dalam jumlah yang banyak, hal ini bisa menyebabkan penurunan kemandirian finansial tersebut. Sebab, daerah tersebut dianggap belum mampu mendanai kegiatannya secara mandiri (Marzuki et al., 2023).

4. Belanja Modal

Belanja modal adalah alat bagi pemerintah daerah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan infrastuktur dan fasilitas pelayanan publik menjadi komponene dari belanja modal yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian daerah di masa yang akan



datang. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan fisik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas daerah, diharapkan daerah tersebut dapat mandiri dalam aspek keuangan dan ketergantungan daerah pada anggaran pusat rendah (Malau & Simarmata, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang diambil melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada website resmi www.djpk.kemenkeu.go.id selama periode waktu 2019-2023. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota. Pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan menggunakan sampling jenuh, yakni semua anggota populasi dijadikan sampel. Berarti sampel yang digunakan juga sebanyak 18 kabupaten dan 5 kota.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa metode dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi analisis melalui dokumentasi. Teknik dokumentasi yang diterapkan melibatkan pengumpulan data berupa laporan realisasi APBD secara berturut-turut dari 2019-2023 yang memuat realisasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan software microsoft excel 2021 dan eviews 12.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. 1
Hasil Statistik Deskriptif

	KKD	LOGPAD	LOGDAU	LOGBM
Mean	0.123217	25.37923	26.97403	25.88344
Median	0.110000	25.41615	26.90750	25.94917
Maximum	0.350000	26.47529	27.56337	26.76516
Minimum	0.020000	23.11499	26.47222	24.82320
Std. Dev.	0.050150	0.550506	0.287850	0.412018
Observations	115	115	115	115

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Berdasarkan hasil tabel analisis deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai maksimum sebesar Rp 26.47529 dan minimum sebesar Rp 23.11499, kemudian variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai maksimum Rp 27.56337 dan minimum sebesar Rp 26.47222, Variabel Belanja Modal memiliki nilai maksimum Rp 26.76516 dan nilai minimum sebesar 24.82320.



2. Analisis Korelasi

Tabel 4. 2
Analisis Korelasi

Covariance Analysis: Ordinary
Date: 03/05/25 Time: 01:11
Sample: 2019 2023
Included observations: 115

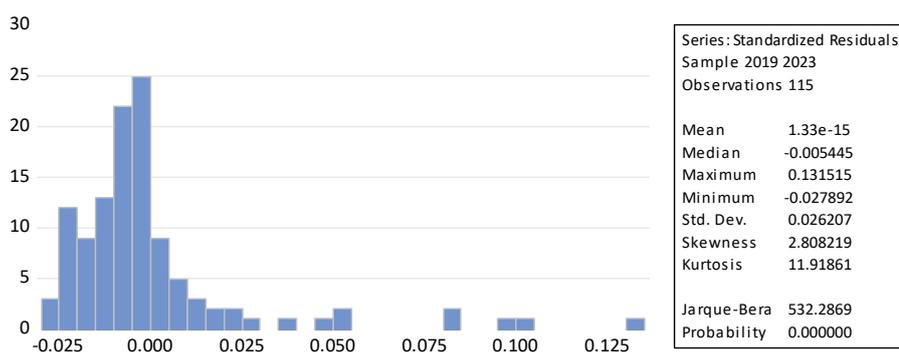
Correlation t-Statistic Probability	KKD	LOGPAD	LOGDAU	LOGBM
KKD	1.000000 ----- -----			
LOGPAD	0.630728 8.640066 0.0000	1.000000 ----- -----		
LOGDAU	0.076351 0.813995 0.4174	0.763790 12.57886 0.0000	1.000000 ----- -----	
LOGBM	0.004652 0.049452 0.9606	0.396642 4.593117 0.0000	0.532504 6.687626 0.0000	1.000000 ----- -----

Adapun hasil analisis korelasi variabel bebas dan variabel terikat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) berkorelasi positif tapi tidak signifikan pada level 10% dengan kemandirian keuangan daerah sebesar 0.630728.
2. Dana alokasi umum (DAU) berkorelasi positif dan signifikan pada level 10% dengan kemandirian keuangan daerah sebesar 0.076351.
3. Belanja modal (BM) berkorelasi positif dan signifikan pada lever 10% dengan kemandirian keuangan daerah sebesar 0,004652.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normaliitas



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Gambar 4. 1 Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji diatas menunjukkan hasil uji nilai probability pada pengujian Jarque-Bera sebesar 0.000000. ($0.000000 < 0.05$) maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa data ini tidak berdistribusi normal.



b. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 3
Uji Multikolinearitas

	KKD	LOGPAD	LOGDAU	LOGBM
KKD	1	0.63072770	0.07635070	0.00465204
LOGPAD	0.63072770	1	0.76379049	0.39664175
LOGDAU	0.07635070	0.76379049	1	0.53250369
LOGBM	0.00465204	0.39664175	0.53250369	1

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Tabel 4.3 dari hasil uji Multikolinearitas menunjukkan koefisien PAD dan DAU sebesar $0.076379049 < 0.8$. Koefisien PAD dan BM $0.39664175 < 0.8$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh cell antar variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai korelasi yang berada di bawah 0.8 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. 4
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistics	Prob.
C	0.339733	0.527464	0.644088	0.5208
LOGPAD	-0.003282	0.014454	-0.227051	0.8208
LOGDAU	-0.008495	0.029979	-0.283371	0.7774
LOGBM	0.001812	0.014727	0.123056	0.9023

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, bahwa seluruh variabel bebas pada hasil uji-Glejser diatas 0,05 maka dari itu ditarik kesimpulan bahwa data dari penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 4. 5
Uji Autokorelasi

R-squared	0.239122	Mean dependent var	-6.44E-16
Adjusted R-Squared	0.204219	S.D. dependent var	0.022819
S.E. of regression	0.020356	Akaike info criterion	-4.900156
Sum squared resid	0.045164	Seharzriterion	-4.756942
Log likelihood	287.7590	Hannan-Quinn criter	-4.842026
F-statistic	6.851106	Durbin-Watson stat	1.917386
Prob (F-statistic)	0.000014		

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai *Durbin Watson*. Pada penelitian ini nilai *Durbin Watson* sebesar 1.917386. Nilai tersebut berada diantara nilai toleransi di dalam uji autokorelasi yaitu -2 dan 2. Berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh (Gujarati & Porter, 2012), nilai



tersebut masih dalam rentang terbebas dari gejala autokorelasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model pada penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi.

4. Uji Asumsi Regresi Linier

Tabel 4. 6
Estimasi Regresi Data Panel (*Fixed Effect Model*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.125090	0.729592	1.542082	0.1266
LOGPAD	0.080321	0.004966	16.17258	0.0000
LOGDAU	-0.118983	0.027658	-4.301916	0.0000
LOGBM	0.006533	0.003242	2.014829	0.0469
R-Squared	0.965492	Mean dependent var		0.123217
Adjusted R-squared	0.955799	S.D. dependent var		0.050150
S.E. of regression	0.010543	Akaike info criterion		-6.070739
Sum squared resid	0.009894	Schwarz criterion		-5.450146
Log likelihood	375.0675	Hannan-Quinn criter		-5.818844
F-statistic	99.60536	Durbin-Watson stat		2.876148
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025

Model regresi data panel *Fixed Effect Model* (FEM) dapat dijelaskan melalui persamaan berikut:

$$KKD = 1.125090 + 0.080321 PAD - 0.118983 DAU + 0.006533 BM + eit$$

Berdasarkan hasil estimasi data panel dengan metode Fixed Effect Model yang ditujukan:

- a. Kemandirian keuangan daerah memiliki nilai konstanta sebesar 1.125090. Ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal tidak memiliki nilai (bernilai 0). Dengan demikian keuangan daerah akan tetap konstan dengan nilai 1.125090.
- b. Pendapatan asli daerah (PAD) memiliki hubungan positif terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai koefisien sebesar 0.080321, ini berarti apabila PAD meningkat sebesar 1% maka kemandirian keuangan daerah akan bertambah sebesar 0.080321%.
- c. Dana alokasi umum (DAU) memiliki hubungan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai koefisien sebesar -0.0118983, berarti apabila DAU meningkat sebesar 1% maka kemandirian keuangan daerah akan berkurang sebesar -0.0118983.
- d. Belanja modal (BM) menunjukkan hubungan positif terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai koefisien sebesar 0.006533. yang menunjukkan bahwa jika BM ditambah 1% maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah akan naik sebesar 0.006533%.



1. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial

Uji parsial dilaksanakan untuk memahami apakah terdapat dampak secara individu terhadap variabel dependen. Ketentuan uji t yaitu dengan melihat nilai t_{tabel} dengan t_{hitung} . Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara mendapatkan t_{tabel} : $(n-k) = 115 - 4 = 111$. Berikut ini hasil pengujian parsial dalam penelitian ini adalah 1.65870.

- 1) Dilihat dari data yang ada nilai t_{hitung} PAD yaitu 16.17258 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1.65870 artinya PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hal ini juga terlihat dari nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0,05$.
- 2) Nilai data selanjutnya t_{hitung} DAU yaitu -4.301916 lebih kecil dari t_{tabel} yaitu 1.65870 artinya DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0,05$.
- 3) Selanjutnya ialah t_{hitung} BM yaitu 2.014829 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1.65870 artinya BM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0.0469 < 0,05$.

b. Uji F

c. Tabel 4. 7

Uji Simultan (Uji-F)

F-statistic	F-tabel	Alpha	Probabilitas	Keterangan
99.60536	2,69	0,05	0,000000	Signifikan

Sumber : Hasil Olah Data, 2025

Dilihat dari Tabel diatas menunjukkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $99.60536 > 2,69$ dengan probabilitas $0.000000 < 0,05$ artinya bahwa secara serentak pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal pada 23 Kabupaten/Kota berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hal ini dapat dilihat dari $0.000000 < 0,05$.

2. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 4. 8

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi R2

R-squared	0.965492
Adjusted R-squared	0.955799

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas dapat disimpulkan jika nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0.955799. Maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah dalam penelitian



ini sebesar 95,58 % dan $1-0,955799 = 0,044201$ yang berarti 4,42 % lainnya dipengaruhi di luar variabel ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh”. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh periode 2019-2023.
2. Dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh periode 2019-2023.
3. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh periode 2019-2023.
4. Secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan Daerah pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh periode 2019-2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Machfud, Asnawi, & Naz'aina. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423>
- Mahardika, & Fauzan. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 407–4016.
- Malau, E. I., & Simarmata, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 3(2), 332–337. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>
- Marzuki, Akhyar, C., & Silaturrahmi. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Wilayah Timur Indonesia. *Jurnal Visioner & Strategis*, 12(2), 37–46. <https://journal.unimal.ac.id/visi/article/view/1205>
- Pemerintah Aceh Masih Bergantung dengan Transfer Pusat*. (2022). Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2022/12/23/080418578/mendagri-tito-karnavian-ungkap-pemerintah-aceh-masih-bergantung-dengan>
- Samudra, G., & Handayani, N. (2020). Pengaruh Kemandirian, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–20.
- Setiawan, P., Widiyanti, R., Siregar, L. M., Nurhaida, N., & Oktavia, E. (2021). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(1), 44–53. <https://doi.org/10.31869/me.v7i1.2536>